

## PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN GORONTALO PERIODE 2015-2019

Ramlah Alkatiri<sup>1</sup>, Nur Eng Mokodompit<sup>2</sup> Mohktar N. Kilo<sup>3</sup>

*Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo*  
[ramlahalkatiri@umgo.ac.id](mailto:ramlahalkatiri@umgo.ac.id), [Nurengmokodompit@umgo.ac.id](mailto:Nurengmokodompit@umgo.ac.id)

### Abstract

The objective of research were: 1) to determine that the Local Taxes ia influenced on Economic Growth at Gorontalo Regency in 2015-2019 and 2) to determine, how much the influence value between local taxes and the economic growth of Gorontalo Regency for the period 2015-2019. The method used quantitative research approach with the type of research was an explanatory research. The result of research obtained that 1). There ia the influence of Local Taxes on Economic Growth at Gorontalo Regency in periode of 2015-2019, this is proven through statistical test which is obtained significance value 0.006 small than  $\alpha$  0.05, and 2) The coefficient of determination obtained is 0.921, this explains that the level of influence of the local tax variable on economic growth is very strong and has a positive value.

**Keywords: Local Taxes, Economic Growth**

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo periode 2015-2019 dan 2) Untuk mengetahui berapa besar nilai keterpengaruhannya antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo periode tahun 2015-2019. Metode Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian penjelasan (explanatory research). Hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian didapatkan bahwa: 1) terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo periode 2015-2019, hal ini dibuktikan melalui uji statistik didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.006 lebih kecil dari  $\alpha$  0.05, dan 2) Nilai Koefisien Determinasi yang didapatkan sebesar 0.921 hal ini menjelaskan bahwa tingkat keterpengaruhannya variabel pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kuat dan bernilai positif

**Kata Kunci: Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi**

*Received: 8 Juni 2021*

*Revised: 9 Juni 2021*

*Accepted: 10 Juni 2021*

### PENDAHULUAN

Pemerintah pusat telah memberikan otonomi kepada masing-masing daerah untuk mengelola dan bertanggungjawab serta mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan adanya pemberian otonomi

daerah, maka suatu daerah diharapkan agar lebih meningkatkan dan menggali segala sumber pendapatannya sendiri. Akan tetapi harus dalam batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar daerah tidak sewenang-wenang memungut dari

masyarakat. Otonomi daerah dapat menjadikan daerahnya maju dan berkembang sesuai dengan tujuan otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah diharapkan untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua hal-hal potensial dari daerah, yang diperoleh dari daerah setempat yang dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melaksanakan keberlangsungan otonomi daerah maka daerah sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, serta pendapatan daerah lainnya (Yunus, 2015).

Menurut UU Nomor. 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan partisipasi wajib pada daerah yang terutang oleh orang individu ataupun lembaga yang bersifat mengharuskan berlandaskan hukum dengan tidak memperoleh kompensasi dengan cara langsung serta dipakai buat kebutuhan Daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Siahaan dalam Sunanto (2015) menjelaskan bahwa pajak daerah

merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Besar kecilnya penerimaan pajak daerah, akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 terdiri dari dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Provinsi pula terdiri dari (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Air Permukaan; dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses ekonomi yang dapat diketahui melalui kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Nopirin, 2005;1). Jumlah persentase kenaikan output harus lebih besar dari persentase jumlah kenaikan penduduk dalam jangka panjang. Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dalam menilai keberhasilan pembangunan wilayah

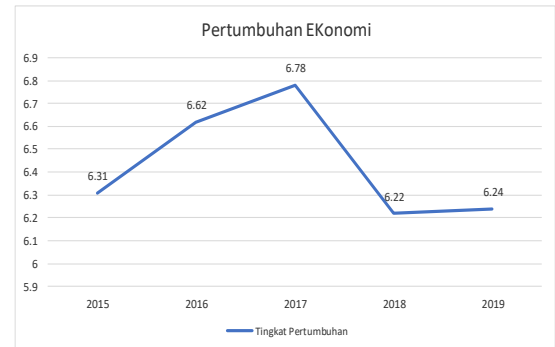
yang diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat menunjukkan proses pembangunan ekonomi (Kuncoro, 2007:37).

Transformasi peran serta sektor yang terjalin menyebabkan pergantian struktur ekonomi yang sanggup diartikan pula sebagai transformasi peran serta berbagai sektor dalam menghasilkan produksi, struktur produksi nasional, dan pemanfaatan tenaga kerja. Kabupaten Gorontalo ialah salah satu kabupaten yang mempunyai tingkatan perkembangan ekonomi relatif besar bila dibanding dengan kabupaten yang lain di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2015-2017, Kabupaten Gorontalo memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,31%, - 6,78% sementara pada tahun yang sama pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisar pada 4,88% - 5,02%.

Namun demikian pada tahun 2018 tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan menjadi sebesar 6,22%, sementara Indonesia pada tahun yang sama mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%. Mengecilnya tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut dikarenakan adanya fluktuasi ekonomi yang berkepanjangan, melonjaknya nilai dollar Amerika terhadap rupiah. Berikut tingkat

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo periode 2015-2019.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo



Sumber: BPS, 2020

Berdasarkan gambar di atas, ternyata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, cukup fluktuatif. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena dampak dari perekonomian nasional yang terjadi akhir-akhir ini.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik guna pemenuhan kewajiban pajak daerah. Letak Kabupaten Gorontalo ini sangat bertepatan dengan lokasi penerbangan pesawat. Dengan adanya fasilitas yang tersedia di daerah kabupaten Gorontalo dapat menjadikan daerahnya maju dan berkembang. Fasilitas yang disediakan tentunya diharapkan dapat menambah jumlah pendapatan yang akan

diterima oleh daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan salah satunya pajak daerah.

Berdasarkan data di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo didapatkan bahwa dari tahun ke tahun pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selalu menaikkan target untuk penerimaan pajak daerah, akan tetapi realisasi untuk penerimaannya itu fluktuatif. Dari tahun ke tahun sejak tahun 2015, realisasi pajak daerah di bawah dari target. Begitupun yang terjadi pada tahun terakhir yaitu 2019, target yang dinaikkan tetapi realisasinya menurun. Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo yang bersifat fluktuatif disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan kurang mengingat bahwa betapa pentingnya pajak bagi daerah bahkan negara. Salah satunya pajak hotel dan restoran yang tingkat kepatuhannya masih kurang. Penyebab rendahnya penerimaan pajak restoran yang ada di kabupaten Gorontalo, karena jumlah pajak disetorkan sebulan sekali berdasarkan nilai pendapatan yang diterima yang dipotong dengan tarif pajak restoran.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk

melakukan penelitian. Penelitian ini akan menguji setiap komponen dalam pajak daerah kabupaten Gorontalo yang terdiri dari delapan komponen diantaranya: (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan (8) pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan pada besarnya kontribusi dan pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi..

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo yang direncanakan akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021. Penelitian ini di desain dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yaitu, suatu penelitian yang menggunakan analisis perhitungan-perhitungan atau formulasi alat analisis yang menghasilkan angka-angka hasil perhitungan. Analisis kuantitatif dalam penelitian adalah untuk menguji teori tentang pajak daerah terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gorontalo.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu variabel bebas atau

independen (X) yang menunjukkan besarnya pajak daerah, dan variabel terikat dependen (Y) adalah Nilai PDRB (pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gorontalo).

Mengingat penelitian ini menggunakan basis data sekunder, dengan mengamati data-data perkembangan PDRB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015 – 2019) serta data pajak daerah, maka populasi dan sampel adalah data-data times series tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi:

- a) Lembar Observasi, yaitu lembaran yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis mengenai masalah-masalah yang diteliti.
- b) Dokumentasi, yaitu mendokumentasikan data-data sekunder yang diperoleh dari Bappeda, Badan Keuangan dan BPS Kabupaten Gorontalo.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2001:9). Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Gorontalo dan Pajak Daerah pada kurun waktu tahun 2015 - 2019.

Data yang telah diperoleh dan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis secara kuantitas dan kualitas.

#### 1. Analisis Kualitatif

Yaitu analisis yang mengungkapkan masalah tidak dalam bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai-nilai yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan penilaian penulis

#### 2. Analisis Kuantitatif

Yaitu analisis yang menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan menyajikan informasi data penelitian berupa mean, median dan standar deviasi. Ringkasan informasi tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Pajak_Daerah	5	15.09	31.29	22.6798	6.76041
Pertumbuhan_Ekonomi	5	6.91	12.89	9.9756	2.69333
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Olahan data, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata hitung dari variabel pajak daerah (X) menjelaskan bahwa pendapatan pajak daerah minimum sebesar

15.09 dan pendapatan maksimum sebesar 31.29, rata-rata total pendapatan sebesar 22,6798.

Rata-rata hitung dari variabel pertumbuhan ekonomi (Y) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara minimum sebesar 6.9 dan pertumbuhan ekonomi secara maksimum sebesar 12.89, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 9,9756.

## 2. Regresi Linear Sederhana

Analisa regresi dipakai untuk mengenali arah ikatan antara variabel bebas dengan

variabel terikat, apakah tiap- tiap variabel bebas berkaitan positif ataupun negatif serta untuk memperhitungkan nilai dari variabel terikat bila angka variabel bebas mengalami eskalasi ataupun penyusutan.

Hasil analisis pengujian dengan menggunakan aplikasi SPSS, diperoleh hasil regresi linear berganda sebagai berikut.

**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.213	1.317		.921	.425
Pajak_Daerah	.386	.056	.970	6.886	.006

a. Dependent Variable: Pertumbuhan\_Ekonomi  
Sumber: Olahan data, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 1.213 + 0.386$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 1.213 menunjukkan apabila tingkat pajak daerah nilainya konstan, maka nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 1.213.

Nilai koefisien pajak daerah sebesar 0.386 menunjukkan bahwa jika variabel pajak daerah naik satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0.386 atau 38.6%. Koefisien variabel ini bernilai positif yang menunjukkan pengaruh positif antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

## 3. Koefisien Korelasi

Uji korelasi bermaksud untuk mengenali tingkatan keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r).

uji korelasi dicoba buat mengenali apakah variabel X mempengaruhi kepada variabel Y, sekalian mengenali tingkatan keterpengaruhannya, apakah termasuk kategori sedang, erat ataupun kategori sangat sempurna. Ada pula jenis pengaruh antar variabel X serta Y bisa bersifat positif serta negatif. Apabila bersifat positif artinya semakin besar variabel X sehingga akan menaikkan variabel Y, sebaliknya apabila bersifat negatif artinya semakin besar variabel X hingga akan mengurangi variabel Y.

Hasil analisis yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Korelasi**

		Pajak_D aerah	Pertumbuhan_ Ekonomi
Pajak_Daerah	Pearson Correlation	1	.970**
	Sig. (2-tailed)		.006
	N	5	5
Pertumbuhan_Ekonomi	Pearson Correlation	.970**	1
	Sig. (2-tailed)	.006	
	N	5	5

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Olahan data, 2021

Berdasarkan data diatas, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.006 (Sig.2-tailed) lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya pada derajat pengaruh antar variabel didapatkan nilai  $p=0.970$ , hal ini menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh yang sangat kuat antara variabel pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

#### 4. Uji Koefisien Determinasi (adjusted R2)

Hasil pengujian koefisien determinasi (Adjusted R2) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.970 <sup>a</sup>	.941	.921	.75861

a. Predictors: (Constant), Pajak\_Daerah

Sumber: Olahan data, 2021

Berdasarkan tabel diatas, melalui pengujian yang telah dilakukan di peroleh nilai adjusted R2 sebesar 0.921. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen yakni pajak daerah dapat dapat mempengaruhi variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 92.1%, sedangkan sisanya sebesar 7.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model (yang diteliti).

mengetahui berapa besar nilai keterpengaruhan antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo periode tahun 2015-2019.

Sukirno (2015:14) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari gross domestic product potensial atau output dari suatu negara. Sedangkan menurut Boediono (1999:75), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo periode 2015-2019 dan 2) Untuk

Suatu perekonomian bisa dibilang mengalami perkembangan bila tingkatan aktivitas ekonomi lebih besar dari yang digapai pada waktu sebelumnya. Perkembangan serta

kemajuan terkini terwujud bila jumlah wujud beberapa barang serta pelayanan yang diperoleh meningkat besar pada tahun selanjutnya.

Bersumber pada Undang-undang Republik Indonesia No 28 tahun 2009 Mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 Mengenai Pajak serta Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan: iuran wajib yang dilakukan oleh orang individu ataupun institusi pada daerah tanpa balasan langsung yang seimbang yang bisa dipaksakan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sah, yang dipakai buat mendanai pengelolaan pemerintah daerah serta pembangunan daerah. Pengertian Pajak Daerah menurut Raharjo (2009:72) bahwa "Pajak Daerah ialah kewajiban penduduk warga memberikan beberapa dari kekayaan pada daerah dikarenakan sesuatu keadaan, peristiwa ataupun perilaku yang memberikan peran tertentu, namun bukan selaku sesuatu sanksi ataupun hukum".

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010:7) bahwa merupakan: iuran wajib yang dilakukan oleh daerah pada orang individu ataupun lembaga tanpa balasan langsung yang seimbang, yang bisa dipaksa bersumber pada peraturan perundang-undangan yang resmi, yang dipakai buat mendanai pengelolaan pemerintah daerah serta pembangunan wilayah.

Dari berbagai opini para pakar, bisa dinyatakan jika pajak wilayah ialah iuran wajib daerah bersifat mengharuskan bersumber pada peraturan tanpa balasan langsung yang dipakai buat membiaya penyelenggaraan,

pembangunan serta kebutuhan daerah buat kemakmuran masyarakat. Dengan kata lain pajak daerah ialah partisipasi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya dipakai buat mendanai pengeluaran daerah untuk melakukan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

Pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan di Kabupaten Gorontalo terdiri atas: 1) pajak hotel; 2) pajak restoran; 3) pajak hiburan; 4) pajak reklame; 5) pajak penerangan jalan; 6) pajak mineral bukan logam dan batuan; 7) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; 8) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); 9) pajak air tanah; dan 10) pajak parkir.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh persamaan perhitungannya adalah  $Y = 1.213 + 0.386$ . Berdasarkan model persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1.213, dapat diartikan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2015-2019 sebesar 1.213 dengan asumsi variabel pajak daerah tidak mengalami perubahan (konstan).

Nilai koefisien pajak daerah sebesar 0.386 menunjukkan bahwa jika variabel pajak daerah naik satu satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0.386 atau 38.6%. Koefisien variabel ini bernilai positif yang menunjukkan hubungan positif antara pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis koefisien korelasi didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.006 (Sig.2-tailed) lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah berkorelasi



dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya pada derajat hubungan antar variabel didapatkan nilai pearson correlation sebesar 0.970, hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara variabel investasi swasta dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfani Nuri tahun 2018 dengan judul penelitian Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Karawang Tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa pada 5 tahun terakhir (2012-2016) variabel pendapatan pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena > maka ditolak, dengan presentase pengaruh variabel independen yaitu pendapatan pajak daerah terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh yang signifikan dengan memberikan kontribusi sebesar 91,5% terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan sisanya 8,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo periode 2015-2019, hal ini dibuktikan melalui uji statistik didapatkan

nilai signifikansi sebesar 0.006 lebih kecil dari  $\alpha$  0.05, dan 2)

Nilai Koefisien Determinasi yang didapatkan sebesar 0.921 hal ini menjelaskan bahwa tingkat keterpengaruh variabel pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat kuat dan bernilai positif.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

Peranan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah penting, untuk itu agar supaya menjadi sektor yang dapat diandalkan, maka pemerintah daerah harus mampu mengelola sektor ini dengan baik termasuk memberikan stimulus bagi pelau ekonomi yang bergerak pada sektor ini.

Perlu adanya koordinasi antar sektor dalam pembuatan kebijakan sehingga pendapatan pajak daerah dapat dilakukan secara optimal.

Disarankan bagi peneliti selanjutnya kiranya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian yang akan datang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akrom Hasani. 2010. Analisis Struktur Perekonomian Berdasarkan Pendekatan Shift Share di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003-2008
- Amir Hidayat dan Nazara Suhail. 2005. Analisis Struktur Ekonomi dan Kebijakan strategi pembangunan Jawa Timur tahun 1994-2000. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia. Jakarta: LPFE UI.

- Arsyad, Lincoln. 2014. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Gorontalo Dalam Angka. .2017
- ..... 2017. Kabupaten Gorontalo Dalam Angka.
- Beni Harisman. 2007. Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor-Sektor Unggulan di Provinsi Lampung (Periode 1993-2003)
- Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE
- Dewi Sondari. 2007. Analisis Sektor Unggulan Dan Kinerja Ekonomi Provinsi Jawa Barat.
- Deliarnov. 2005. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djojodipuro, Marsudi. 2012. Teori Lokasi. Jakarta: LPFE UI.
- Gita Irina Arief. 2009. Identifikasi Dan Peran Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta
- Jhingan, M. L. 1993. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. Metode Kuantitatif dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi 1. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mardikanto, Tatok dan Poerwoko Soebianto. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan. Alfabeta. Bandung
- Mubyarto. 1995. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI.
- Ningtyas, Betha Rosy. 2013. Dampak Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- Richardson, Harry W. 1973. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjemahan Paul Sitohang, Edisi Revisi. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta
- Rostow, Walt, W. 1960. The Stages of Economic Growth: A Non-Cominist Manifesto. Cambridge University Press. London
- Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang.
- Sukirno, Sadono. 2015. Makro Ekonomi, Edisi keempatbelas (alih bahasa Haris Munandar dkk). Jakarta: Erlangga.
- Sukanto, Dimas Gadang Tattaqun. Analisis Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Jawa Tengah (Pendekatan Analisis Input-Output). Jurnal. Semarang: FE UNDIP.
- Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi regional. Jakarta: Bumi Aksara.
- ..... 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1960. Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

- Todaro M.P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta Erlangga.
- Uray Dian Novita. 2013. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kota Singkawang Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk Produk Romestik Regional Bruto (PDRB)
- Wrihatnolo, R R, Dwidjowitojo, R N. 2007. Manajemen Pemberdayaan. Elek Media Komputindo. Jakarta.